

Resolusi Konflik Umat Beragama Melalui Pendidikan Agama

Oleh H. Imam Moedjiono¹

Iftitah

Perbincangan mengenai agama seolah tidak pernah surut dari perdebatan publik. Bagi mayoritas orang, agama dianggap menyentuh bagian yang paling dalam dan paling asasi pada kehidupannya dan terasa amat dekat, bahkan telah menjadi urat nadi kehidupan manusia. Namun kadangkala kerap pula terasa begitu jauh yang tampak pada adanya konflik, kekerasan, penindasan, peperangan, bahkan pembunuhan atas nama agama. Belakangan agama sering "ditampilkan" sekelompok orang dengan wajah "bringas", seolah-olah agama telah kehilangan wajah ramah dan penuh kasih sayang.

Beberapa berita utama televisi atau surat kabar di dunia menampilkan judul-judul yang mengundang stigma negatif pada agama tertentu seperti: "*Hindu dan Muslim di Ujung Peperangan Khasmir*", "*Kristen Serbia diadili atas Pelaku Tindak Kekerasan Terhadap Muslim Bosnia*", "*Militer Yahudi Membunuh Puluhan Kaum Muslim di Kamp Pengungsian*", "*Militer Muslim Menewaskan Belasan Orang Israel Melalui Bom Bunuh Diri di Restoran Pizza Yerusalem*", "*Pemeriksaan Pengadilan Mulai Mengarah kepada Menteri Kristen*

Fundamentalis dalam Kasus Dokter Aborsi", dan masih banyak lagi judul-judul berita yang potensial mendatangkan stigma negatif pada agama.

Orangpun bertanya-tanya, ada apa dengan agama? Benarkah, agama mampu membuat umatnya memiliki rasa percaya diri menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi? Mampukah agama menjamin pemeluknya tetap eksis pada *hyper competitive era*? Apakah agama mengandung unsur-unsur yang melegitimasi kekerasan, atau teror?

Dalam koridor semacam ini, sangat beralasan apabila ada kalangan yang mengatakan bahwa agama merupakan sumber konflik dan mendatangkan masalah yang cenderung bersifat *anakronistik* (tidak cocok untuk zaman tertentu). Akan tetapi, menyatakan agama semata-mata sebagai sumber konflik, jelas tidak arif dan a-historis.

Selama berabad-abad bisa dilihat iman yang memperteguh kehidupan telah menopang dan memberi makna bagi jutaan manusia. Tepat apabila ada yang menyatakan, berbicara tentang agama berarti berbicara tentang sebuah paradoks.

¹ Drs. H. Imam Moedjiono, M.Ag., Ketua Jurusan Tarbiyah dan Dosen FIAI UII Yogyakarta

Sisi mengkhawatirkan sekarang adalah jika paradoks tersebut berjalan semakin timpang. Beberapa dasa-warsa terakhir kita melihat serangkaian tragedi yang dipandang bernuansa keagamaan, semisal teror 11 September 2001, bom Bali, kasus gas beracun Aum Shinrikiyo pimpinan Asahara Shoko di Jepang, bom Oklahoma, Perang Khasmir, penghancuran Afganistan, konflik Israel dengan Palestina yang tidak berkesudahan, bunuh diri massal di People Temple pimpinan Jim Jones di Guyana, gerakan David Koresh di Texas, dan lain sebagainya. Atau dalam spektrum kecil keindonesiaan seperti kasus Poso, Ambon, Papua, Aceh, bom Marriott, Ketapang, kupang, Situbondo, bom Natal, dan yang semacamnya.

Masyarakat Indonesia dengan tingkat kemajemukan yang tinggi baik etnik, budaya, ras, bahasa, dan agama merupakan potensi sekaligus ancaman. Beberapa konflik bernuansa SARA diatas, sering dikaitkan dengan kegagalan bangsa ini dalam memahami pluralitas. Secara spesifik pendidikan juga dituding telah gagal menjalin kebaragaman melalui pendidikan yang melampaui sekat agama (Syamsul Maarif, 2005).

Seolah-olah wajah teduh agama semakin hilang dan yang tersisa hanyalah kebringasan, dan belakangan, atas semua yang terjadi itu, membuat agama dipandang sebagai sebuah nama yang sarat konflik, membuat gentar dan cemas banyak kalangan. Dengan menunjuk tragedi 11 September 2001 sebagai puncak eskalasi kekerasan bertopengkan agama, banyak orang kian dicekam

pesimisme tentang peran agama di awal fajar milenium ini.

Hal ini seakan mewakili kecemasan umat manusia akan potensi penyalahgunaan agama tersebut. Buku karya Charles Kimball (2003) berjudul *Kala Agama Jadi Bencana*, berhasil memetakan secara cantik beragam potensi dan asal-usul kekerasan setiap agama, sembari tidak lupa mengguratkan pelbagai kemungkinan perbaikan yang mendukung kembalinya *khittah* agama sebagai penebar cinta, kasih sayang dan perdamaian antar sesama.

Teori-teori Penyebab Konflik

Konflik merupakan hal alamiah yang telah ada sejak manusia diciptakan. Dalam kehidupan, konflik merupakan sesuatu yang mendasar dan esensial, serta mempunyai potensi destruktif maupun konstruktif. Ini dimungkinkan karena di dalamnya mengandung variable yang bergerak bersamaan secara dinamis dan sekaligus merupakan proses yang wajar pada suatu kelompok atau masyarakat.

Meskipun konflik merupakan hal alamiah dan mampu menumbuhkan dinamika, dapat menjadi persoalan serius jika sudah memuncak dan mengganggu ketentraman hidup atau bahkan membahayakan jiwa. Overdosis konflik selalu kontraproduktif dalam organisasi. Oleh karena itu, yang penting dilakukan adalah, bagaimana *me-managanya*.

Simon Fisher (2001), dalam *Mengelola Konflik : Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak*, mengemukakan teori-teori tentang penyebab terjadinya konflik yang antara lain:

1. Teori hubungan masyarakat menganggap bahwa konflik disebabkan polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:
 - a. Meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik.
 - b. Mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya.
2. Teori negosiasi prinsip menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:
 - a. Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu, dan menciptakan kemampuan untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan daripada posisi tertentu yang sudah tetap.
 - b. Melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak.
3. Teori Kebutuhan Manusia Berasumsi bahwa konflik yang berakar disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia (fisik, mental, dan sosial) yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi sering merupakan inti pembicaraan. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:
 - a. Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu.
 - b. Agar pihak-pihak yang mengalami konflik mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pihak.
4. Teori Identitas Berasumsi bahwa konflik disebabkan identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:
 - a. Melalui fasilitas lokakarya dan dialog antara pihak-pihak yang mengalami konflik diharapkan dapat mengidentifikasi ancaman-ancaman dan ketakutan yang dirasakan masing-masing dan untuk membangun empati dan rekonsiliasi.
 - b. Meraih kesepakatan bersama yang mengakui kebutuhan identitas pokok semua pihak.
5. Teori Kesalahpahaman Antarbudaya Berasumsi bahwa konflik disebabkan ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi berbagai budaya yang berbeda. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:
 - a. Menambah pengetahuan pihak-pihak yang mengalami

Wajar saja bila orang menggugat dan berpendapat demikian, karena pada dataran realita, itu yang terjadi. Hanya karena berbeda agama dan sedikit polemik, tega membunuh dan menyakiti. Hanya karena berebut pengikut (umat) saling menyudutkan dan mencaci. Kejadian seperti ini bukan hal yang baru dan tidak hanya terjadi sekali dua kali, namun sering kali terulang dan terulang lagi hingga berakhir dengan jatuhnya korban jiwa dan kemelaratan serta penderitaan berkepanjangan.

Itu adalah kondisi riil di lapangan dan menjadi menu rutin hampir dalam setiap pemberitaan dalam maupun luar negeri. Namun jika kemudian secara membabi buta orang memberi stigma kepada agama sebagai pemicu konflik yang memiliki potensi untuk mendatangkan bencana kemanusiaan itu, nampaknya masih perlu dipertanyakan. Agama, pada dasarnya mengajarkan kasih sayang terhadap sesama manusia, apapun agama, kepercayaan, ras, serta bangsanya.

Pertanyaan yang muncul disini, mengapa banyak orang beranggapan bahwa apa yang dilakukannya pada dasarnya telah mendapatkan legitimasi dari Alkitab (Taurat, Injil, al-Quran dan yang lainnya)? Banyak orang ataupun kalangan yang mengutip ayat-ayat al-Quran ataupun al-Hadis tentang izin berperang dan tidak jarang membawa tulisan *ism* Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang untuk mengobarkan perang suci tersebut. Ironis sekali.

Apa memang benar semua permasalahan, terlebih lagi yang berkaitan dengan agama lain, harus diselesaikan dengan jalan kekerasan dan perang (*qital*)? Tidak adakah jalan

yang lebih manusiawi, aman dan nyaman serta menyelamatkan selain perang? Apakah musyawarah yang disarankan oleh kitab suci menjadi tidak berlaku dalam masalah yang satu ini?

Apakah Islam maknanya bukan perdamaian sebagaimana dipahami selama ini? Bukankah ajaran Kristen adalah cinta-kasih? Pertanyaan untuk semua agama yang membenarkan pertikaian dan pertumpahan darah tersebut adalah, apa sebenarnya tujuan yang hendak dicapai dari pertumpahan darah tersebut? Memaksakan hanya ada satu agama dan kepercayaan di muka bumi ini? Mungkinkah itu? Apakah tidak bertentangan dengan *sunnatullah* sendiri yang dalam an-Nahl: 93 Allah menyatakan, "*Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kalian satu umat saja. Tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kalian lakukan*"? Akan banyak lagi pertanyaan yang diberondongkan dari yang menghendaki perdamaian antar pemeluk agama, tanpa adanya konflik.

Pangkal Konflik Antar Agama

Timbulnya konflik keagamaan yang diawali adanya perasaan saling curiga dan akhirnya saling memusuhi antar umat beragama itu, tidak lain diantaranya karena: *Pertama*, adanya cara pandang yang kurang tepat para pemeluk agama terhadap ajaran serta tentang fungsi agama itu. *Kedua*, adanya upaya memaksakan kehendak oleh satu golongan kepada yang lainnya. *Ketiga*, karena agama-agama,

justru lebih ditampakkan sebagai sesuatu yang saling kontradiktif antara yang satu dengan yang lainnya.

Fenomena tersebut tentu saja berkaitan erat dengan interpretasi dan paradigma yang dipakai oleh umat beragama yang sedemikian eksklusif, sehingga semakin mengarah pada akumulasi pembenaran sepihak. Klaim kebenaran (*truth claim*) dan fanatisme buta kemudian muncul dalam bentuk yang nyata menganggap hanya dalam agamanya kebenaran berada sedangkan yang lainnya tidak, "*other religions are false paths, that mislead their followers*" (Ajith Fernando, Republika, 24 Juni 2000).

Seandainya hal tersebut tidak mengemuka dan menjadi sikap beragama masing-masing umat beragama terhadap umat yang lainnya, terutama yang minoritas, tentu tidak menjadi masalah krusial. Namun, jika mengemuka dan menjadi sikap beragama, maka di sinilah pangkal awal terjadinya benturan (*clash*) antara penganut agama yang berbeda tersebut.

Benturan antar penganut agama bukanlah hal yang baru. Kristen Eropa dan Islam Timur Tengah pernah berbenturan selama beratus-ratus tahun lamanya dalam Perang Salib. Di Irlandia Utara, umat Katolik dan Protestan saling bermusuhan. Kashmir, penganut agama Hindu dan umat Muhammad saling bersitegang. Sri Lanka, kaum Budha dan kelompok Hindu saling bercakar-cakaran. India, kaum Sikh dengan Muslim India saling berbenturan. Di Palestina, Yahudi melakukan pengusiran dan tindak kekerasan terhadap orang-orang Kristen dan Muslim.

Melihat realita demikian, umat beragama terkadang merasa frustrasi. Apalagi ketika membuka kembali ayat-ayat al-Quran, bahwa Tuhan memang menciptakan umat tidak hanya satu namun berbeda-beda dan mempunyai potensi serta kecenderungan untuk saling berselisih dan mengalami konflik. Namun demikian, tidak dibenarkan jika kemudian umat Muslim menutup mata dan tidak berusaha melakukan apa-apa bagi terwujudnya apa yang disebut dengan perdamaian hakiki tersebut.

Perdamaian sebenarnya bukan hanya sekedar klise. Tuhan, dengan beragamnya jalan (*syir'ah wa minhaj*) tersebut ingin menguji manusia, seberapa dewasa memahami nilai-nilai yang diturunkan melalui Kitab Suci-Nya dan seberapa bijak menghadapi polemik serta benturan. Selanjutnya Tuhan akan meminta pertanggungjawabannya.

Agama Islam diturunkan Tuhan sebagai "*rahmat*", artinya bukti kasih sayang Tuhan terhadap makhluk-Nya. Dalam surat al-Hasyr ayat 23, misalnya Tuhan menyatakan telah menurunkan agama untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia. Makna dari kata *Islam* adalah damai, bahkan kalimat ini terulang sebanyak 42 kali dalam al-Quran (*Quraisy Syihab*, 2000)

Islam, melalui Nabi saw memberikan pesan moral bagi umat manusia, "*Wahai manusia tebarkanlah salam (perdamaian atau rasa damai), berilah orang lain makan, sambunglah hubungan kasih sayang, dan shalatlah kamu di waktu manusia biasanya tidur niscaya engkau masuk surga dengan sentausa*". (Abu Zakaria Yahya, 1994).

Makna "*salam*" dalam hadis yang sangat masyhur tersebut tentu tidak

Konflik horisontal Islam dan Kristen selalu menjadi diskursus yang tidak ada habisnya. Perbedaan mendasar tentang konsep ke-Tuhanan seolah menjadi dinding pemisah hubungan yang wajar dan harmonis antar pemeluknya. Sentimen dua kelompok penganut anak cucu Ibrahim juga terjadi dalam banyak dimensi seperti sosial, politik, ekonomi dan budaya.

Tidak bisa ditutup-tutupi, antagonisme pemeluk Islam dan Kristen merupakan realita. Banyak pihak menepis konflik tersebut, misalnya kasus Ambon. Namun tidak sedikit pula yang memberikan afirmasi. Sejarah juga telah menunjukkan bagaimana konflik dua agama ini, termasuk Yahudi, telah berupa sejarah panjang. Air mata dan darah menjadi saksi, bagaimana relasi antara keduanya telah menghasilkan kekerasan.

Dua tahun menjelang lengsernya Presiden Soeharto, tahun 1996 terjadi kerusuhan SARA di Situbondo. Ketika itu, sejumlah gereja dibakar, begitu pula sejumlah sekolah dan panti asuhan. Bahkan sebuah rumah yang dihuni oleh seorang pendeta hangus berikut keluarganya. Ini hanya bermula dari kekecewaan massa atas keputusan Pengadilan Negeri Situbondo yang hanya menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara atas seorang terdakwa, Saleh, pemuda yang mempelajari Islam secara tidak utuh, kemudian melecehkan status Nabi Muhammad SAW, dan melecehkan KH As'ad Syamsul Arifin, dengan mengatakan bahwa kiai tersebut mati dalam kesesatan.

Tahun 1998, tidak lama setelah Presiden Soeharto lengser, terjadi

kerusuhan di Ketapang. Berawal dari perkelahian anak muda di sekitar rumah judi, kemudian menewaskan 14 orang, merusak sebuah mushala, dan merobohkan lebih dua puluh bangunan gereja dan sekolah milik umat Kristiani. Selain itu sempat pula menimbulkan penjarahan di sejumlah toko dan pembakaran mobil-mobil pribadi. Tidak terduga umat Kristiani Kupang melakukan perusakan atas rumah ibadah dan aset umat Islam di sana. Peristiwa di Kupang itu adalah pelampiasan amarah yang dinilai oleh sebagian umat Islam sebagai balas dendam. Pemerintah dan sejumlah kalangan menilai sebagai hasil rekayasa pihak tertentu atau hasil ketidakpuasan masyarakat di bidang sosial-politik.

Usai Kupang, meletus perang Ambon Manise, yang juga berawal dari perkelahian anak muda di angkutan kota, lalu terjadi Idul Fitri berdarah yang menewaskan ratusan Muslim. Hampir empat tahun, Ambon menjadi kota mati. Kata orang, suara merdu Nyong dan Nona Ambon berubah menjadi tangisan memilukan. Bau harum pala dan cengkih berganti bau amis darah permusuhan. Asap-asap pesta selamatan dan kenduri, berganti asap mesiu dan sisa reruntuhan rumah ibadah serta pusat pertokoan yang dilalap api. Pela gandong persaudaraan berganti dengan palu godam perseteruan. Sampai akhirnya digelar perundingan damai di Sulawesi Selatan, untuk perdamaian Ambon, yang dikenal sebagai Perjanjian Malino II.

Sementara Ambon berkecamuk, meledak pula perang di Poso. Sejumlah rumah ibadah, pusat pertokoan, wadah pendidikan hancur.

Pesantren Walisongo musnah terbakar bersama santri dan guru-gurunya, tiada yang tersisa. Kristenpun akhirnya kehilangan sejumlah wilayah pemukiman, rumah ibadah, wadah pendidikan, dan kegiatan ekonomi. Kalah jadi abu menang jadi arang. Akhirnya perang Poso pun berakhir setelah digelar Perjanjian Damai Malino I, mendahului perjanjian damai untuk Ambon.

Kerusuhan Kupang dan Ketapang, sulit untuk dikatakan tidak memiliki benang merah. Di Ketapang, gereja-gereja Kristen Protestan dan sekolah-sekolah Kristen Katholik dibakar. Kemudian di Kupang, masjid yang dibakar. Terakhir, kerusuhan dengan pola sejenis terjadi di Ambon dengan lebih dashyat dan memprihatinkan, sehingga patut disebut sebagai "tragedi nasional" yang memilukan sekaligus memalukan sebagai bangsa besar dan sering dikatakan beradab.

Apabila dirangkai, dari berbagai kasus kerusuhan tersebut terlihat bahwa asal mulanya bukan terletak pada konflik agama. Sebelum Kupang, Ketapang dan Ambon, tragedi Situbondo, Karawang dan Tasikmalaya juga dipicu oleh masalah yang tidak bersangkutan paut dengan agama secara langsung. Lantas, yang perlu dipertanyakan adalah "*What can the government do?*". Apakah dengan mencari setiap "aktor intelektual" ataupun "provokator" dalam setiap kasus kerusuhan dapat menyelesaikan masalah?

Marcus Mietzner, memandang di Indonesia telah membudaya anggapan bahwa pada setiap kerusuhan selalu ada "aktor intelektual"-nya. Anggapan tersebut adalah budaya

peninggalan Orde Baru yang menerapkan ideologi "harmoni" semu. Selalu ada "kambing hitam" dengan mengabaikan usaha kongkret sebagai solusi yang diharapkan. Bila demikian, bisa jadi tidak semua kerusuhan yang berbau SARA ada yang merekayasa. Tingkat pluralitas Indonesia yang sangat tinggi dengan pemahaman iman yang belum memadai, dapat mempermudah konflik semacam itu muncul.

Para ulama dan pemuka agama mengutuk keras terhadap berbagai kerusuhan yang berlatarbelakang agama. Rohaniwan secara normatif menyerukan umatnya untuk menahan diri dan tidak mudah dihasut isu-isu yang tidak jelas. Seruan itu tampak indah, karena didasarkan pada prinsip kerukunan antar umat beragama. Adanya kerusuhan berlatarbelakang agama dengan intensitas yang kini semakin besar, mengindikasikan realita bahwa upaya merukunkan umat beragama di Indonesia belum berhasil. Oleh karena itu, tingkat pemahaman terhadap kemajemukan sangat diperlukan. Dengan kesadaran dan tanggungjawab bersama dari semua penganut agama, serta bahu-membahu antara elemen dan komponen bangsa, niscaya akan diperoleh "makna kebangsaan".

Masalah adalah, mengapa begitu mudah umat beragama terlibat konflik dengan melampiaskan amarah yang sedemikian dahsyat? Artinya, mengapa umat Islam dan umat Kristen begitu mudah direkayasa (jika benar) untuk melakukan kerusuhan? Hal ini perlu dilihat dan dikaji secara mendalam. Tidak untuk mencari kambing hitam atau mencari siapa yang bersalah, tetapi sebagai

antisipasi agar peristiwa serupa tidak terulang lagi.

Berdasar pengalaman masa lalu, peran media baik cetak maupun elektronik sangatlah besar, karena media massa berpotensi meredam atau membakar konflik keagamaan. Komitmen pengelola media untuk menjaga keutuhan bangsa, sangat dibutuhkan dalam mewujudkan kehidupan berbangsa menuju masyarakat yang adil dan makmur dibawah curahan rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Di samping itu, *good will* para guru agama dan para da'i atau missionaris, tidak kalah penting. Dengan memberikan dasar-dasar keagamaan agar dihayati dan diamalkan, serta dasar-dasar kehidupan bersama di tengah masyarakat plural dalam semangat saling menghormati tanpa mengurangi keyakinan terhadap kebenaran kepercayaannya, maka konflik keagamaan akan dapat dieliminir.

Sebagian pakar menengarai, bahwa timbulnya konflik yang sering menjurus pada dehumanisasi, antara lain ditimbulkan oleh interpretasi terhadap kitab suci. Sikap radikal dan fundamental menjadikan interpretasi yang rigid terhadap kitab dan kemudian membentuk sikap eksklusif, bahkan ada yang menistakan yang lainnya.

Cendekiawan Islam dan Kristen menuliskan interpretasinya ke dalam tulisan-tulisan dengan berbagai motivasi. Sebagian yang lain menyampaikannya langsung secara oral kepada pemeluknya. Sebagian pemeluk agama tersebut ada yang tetap memegang pemahamannya, tetapi kadang terpengaruh untuk

bersikap toleran atau sebaliknya. Sikap intoleran mengawali segala macam konflik serta menghasilkan sikap *prejudice* dan menyalahkan bahkan mengalahkan yang lainnya.

Di Indonesia, cendekiawan Islam yang *concern* dalam urusan keumatan banyak yang menulis buku tentang agama Kristen. Demikian pula sebaliknya cendekiawan Kristen melakukan hal yang sama sehingga. Karya-karyanya tersebar luas dan dijual bebas di pasaran. Pada umumnya tulisan tersebut didasari kegelisahan intelektual penulisnya dalam menyikapi permasalahan yang ada, serta keinginan mencari jawaban. Demikian juga yang membaca. Satu diskursus yang sangat menarik untuk dijadikan bahan penelitian lanjutan.

Dengan demikian perlu kiranya dibahas resolusi konflik umat beragama melalui dialog emansipatoris: Telaah hubungan Islam-Kristen

Dialog Emansipatoris

Di tengah meningkatnya gejala-gejala konflik dan kekerasan, dapat diamati terjadinya kecenderungan penurunan semangat dialog intra dan antaragama. Kalaupun dialog-dialog diselenggarakan, hanya secara *ad hoc* dan sporadis, tidak secara reguler dan terencana. Akibatnya, upaya penyelesaian konflik tidak pernah secara tuntas, apalagi menyelesaikan secara lebih menyeluruh, akar-akar dan aktualisasi pertikaian dan konflik. Kecenderungan ini sedikit mengherankan dan ironis, karena seharusnya dialog intra dan antaragama semakin ditingkatkan.

Menurunnya dialog intra dan antaragama juga berkaitan erat dengan merosotnya peran lembaga-

lembaga yang dapat memainkan peranan kunci masalah ini. Departemen Agama, yang pada masa Orde Baru memainkan peran sentral dalam dialog-dialog intra dan antaragama, kelihatan kehilangan fokus, orientasi, dan momentum untuk mendorong kehidupan keagamaan yang lebih toleran, harmonis, dan hidup berdampingan secara damai. Tema-tema tentang kerukunan hidup beragama hanya muncul secara sporadis dari pejabat-pejabat tinggi Departemen Agama.

Pada saat yang sama, majelis-majelis keagamaan yang merupakan representasi masing-masing umat beragama, seperti MUI, PGI, KWI, Parisadha Hindu Dharma, dan Walubi, kehilangan elan vitalnya. Majelis-majelis ini lebih banyak merespons perkembangan politik dan isu-isu sesaat atau bahkan sibuk dengan konflik internal di antara berbagai kelompok, aliran, atau denominasi (Azra, *Republika* 25 November 2004).

Masih berlangsungnya kebakuan atau kurangnya sikap proaktif majelis-majelis beberapa tahun terakhir ini jelas tidak menguntungkan. Di tengah kecenderungan meningkatnya friksi dan konflik yang bernuansa keagamaan, sudah waktunya mengambil langkah-langkah proaktif terjadinya rejuvenasi dialog-dialog intra dan antaragama.

Secara etimologis, kata *dialog* berasal dari bahasa Yunani, *dia-logos*, yakni bicara dua pihak. Secara terminologi, kata ini berarti pembicaraan atau percakapan di dua orang/pihak atau lebih berkenaan dengan subyek atau tema tertentu guna terjadinya saling pengertian dan kesepahaman yang dapat meningkat-

kan kerja sama dan toleransi di antara mereka. Prof Dr. H.A. Mukti Ali, guru besar perbandingan agama dan Menteri agama pada awal 1970-an, salah satu pemrakarsa terpenting dialog antaragama, menyatakan *dialog* lebih tepat diartikan sebagai komunikasi di antara orang-orang beriman untuk mencapai kebenaran dan kerja sama guna kemaslahatan bersama.

Lalu, Leonard Swidler sebagaimana dikutip Azra (*Republika* 25 November 2004), merumuskan, *dialog* (intra dan antaragama) sebagai percakapan antara dua orang atau lebih yang memiliki pandangan berbeda, yang tujuan utamanya saling belajar sehingga peserta dialog dapat mengubah pandangannya dan meningkatkan pengalaman keagamaannya. Menurut Daya (2004) tujuan dialog antar agama diarahkan kepada penciptaan hidup rukun, pembinaan toleransi, pembudayaan keterbukaan, pengembangan rasa saling menghormati, saling pengertian, membina integrasi, berkoeksistensi diantara penganut pelbagai agama dan sebagainya.

Dialog emansipatoris dapat diartikan sebagai percakapan yang "membebaskan" karena terjadi pertukaran dan pemahaman timbal balik yang lebih baik. Kondisi terakhir ini dapat "membebaskan" pihak-pihak yang terlibat dari prasangka, bias, persepsi tidak akurat, kecurigaan, dan bahkan sikap bermusuhan dan saling membenci, yang potensial menciptakan konflik yang dapat berujung pada kekerasan.

Dialog intra dan antaragama bisa betul-betul emansipatoris jika tiga syarat bisa dipenuhi. *Pertama*, dialog

dilakukan dengan penuh keterbukaan, keterusterangan, keberanian, dan kejujuran. Dialog antaragama tidak akan emansipatoris, jika peserta tidak terbuka, menutupi hal-hal tertentu, sehingga hanya basa-basi. *Kedua*, dialog disertai kemauan dan iktikad saling mendengar dan mengemukakan pendapat dengan penuh keseimbangan dan kesetaraan. *Ketiga*, dialog disertai kesiapan mengubah pandangan dan persepsi yang selama ini keliru, dan saling membuka diri untuk menerima kebenaran dari berbagai pihak

Resolusi Konflik Keagamaan Melalui Pendidikan

Salah satu aspek penting dalam resolusi konflik antar umat beragama dalam rangka mengembangkan keberagaman yang inklusif dan pluralis sebenarnya adalah pendidikan, terutama pendidikan agama. Sayangnya, aspek pendidikan (agama) selama ini kurang menyentuh hal tersebut, karena pendidikan agama hanya dipandang sebagai persoalan pinggiran yang tidak signifikan.

Pendidikan (dalam arti umum) adalah basis atau dasar untuk menciptakan SDM dan pembentukan karakter suatu bangsa. Pendidikan, sebagaimana ditegaskan Ahmad Syafii Ma'arif dalam Ahmad Fuad Fanani (2001), sesungguhnya juga wahana paling efektif untuk internalisasi nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan inklusivisme.

Pendidikan di Indonesia selama Orde Baru, hanya sebagai proses pemenuhan kewajiban yang cenderung bersifat proyek instan, sehingga yang terjadi hanya sekadar

pembentukan manusia yang siap kerja dan menjadi pegawai. Di era Orde Baru, pendidikan hanya disamakan dengan pengajaran; aspek pembentukan sikap, kepribadian, mental, dan kreativitas jauh dari jangkauan pendidikan. Hasil pendidikan model Orde Baru tidak mengajarkan atau bahkan menjauhi sikap keberagaman yang pluralis-inklusif. Ketika itu yang diajarkan justru yang menumbuhkan sikap kebenaran dan pembelaan yang terkadang dilakukan secara berlebihan pada agamanya sendiri.

Mengingat pendidikan zaman Orde Baru sebatas pengajaran, maka sebagaimana proses *transfer of knowledge*, mengandaikan siswa sebagai obyek yang bisa dibentuk sesuai kemauan guru. Meminjam istilah Paulo Freire, siswa menjadi manusia yang hanya memiliki kesadaran magis, menerima semua yang diterima sebagai kebenaran mutlak, tanpa kesadaran kritis. Padahal, pendidikan sebenarnya pembentukan manusia sempurna yang melalui proses dialogis, penghargaan kemanusiaan, dan saling menekankan kebebasan dan keadilan (*Azyumardi Azra*, 1999).

Kesalahan lain dalam dunia pendidikan kita, menurut Kautsar Azhari Noer (2001) adalah kurangnya apresiasi terhadap pendidikan humaniora. Justru yang digalakkan dan dianggap prestisius, selama ini, adalah pendidikan alam dan teknik yang cenderung mekanistik. Akibatnya, para siswa dan pendidik di Indonesia kurang bisa menghubungkan aspek normatif suatu ilmu pengetahuan dengan kenyataan sosial yang terjadi di sekitarnya.

Pendekatan pendidikan agama yang diterapkan di semua lembaga pendidikan formal adalah bersifat teologis dan *scientific cum doctrinair*. Melalui pendekatan ini, *truth claim* dari religiositas siswa diharapkan dapat tumbuh subur. Begitu pula dengan daya kritis teologisnya dapat berkembang dalam bingkai pluralisme agama konvensional (Saerozi, 2004).

Dalam pendidikan Barat, ilmu humaniora memiliki kedudukan sejajar dengan ilmu lama atau ilmu teknologi lainnya. Pendidikan humaniora adalah pendidikan yang menekankan pada realitas sosial, kepedulian sosial, pembentukan kesadaran, serta perjuangan kemanusiaan dan keadilan.

Sebagai bagian sistem pendidikan nasional, pendidikan agama mengalami kondisi yang tidak jauh berbeda. Oleh karenanya, pendidikan agama selama ini kurang bisa diharapkan kontribusinya dalam pembentukan masyarakat yang menghargai pluralisme dan tidak menunjang demokratisasi. Apalagi, selama ini para guru agama di sekolah dan perguruan tinggi umumnya hanya menekankan ajaran agama yang bersifat teologis-dogmatis, sehingga makin membentuk *chauvinisme* rasa kebenaran pada agamanya sendiri. Dampaknya, pengajaran agama menjadi kurang menyentuh aspek realitas sosial yang sesungguhnya, tidak sampai pada persoalan aksi nyata dari proses perilaku keagamaan.

Hal itu, menurut Amin Abdullah (2001), antara lain disebabkan oleh metode dan sistem pengajaran pendidikan agama. Pendidikan agama cenderung menekankan eksklusivitas kebenaran agama, mengabaikan

aspek pluralitas serta inklusivitas. Selain itu teks-teks yang dijadikan rujukan dan acuan mesti kembali ke masa lalu, seperti Perang Salib, ekspansi bangsa Arab, dan pemaksaan penyebaran agama-agama.

Kautsar Azhari Noer juga menengarai, pendidikan agama selama ini kurang menyentuh aspek fenomenologi agama yang bisa menemukan titik-titik persamaan untuk kemanusiaan universal. Penekanan yang kuat justru pada aspek teologis dan ritualitas formal yang banyak sekali perbedaannya.

Untuk itu, dalam rangka membantu membangun kesepahaman antar umat beragama, telah dilakukan prakarsa langsung para pemuka masing-masing agama melalui dialog-dialog yang dilakukan oleh para elite keagamaan di Indonesia. Namun hasilnya jarang yang sampai pada akar rumput, sehingga tingkat saling memahami hanya terbatas pada tingkat elitnya saja. Di sinilah letak perlunya sosialisasi hasil dialog.

Hasil-hasil dialog tersebut akan lebih cepat sampai pada sasaran dapat ditempuh melalui jalur pendidikan agama, dakwah/misionari atau media massa. Masing-masing jalur tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Jalur pendidikan dan dakwah memiliki tingkat efektifitas yang tinggi karena audience dapat terlibat secara langsung, tetapi memiliki keterbatasan daya jangkauan. Media massa memiliki daya jangkauan yang luas, tetapi tidak dapat melibatkan audience secara langsung. Ketiga jalur tersebut dapat didesain dengan skenario yang saling melengkapi dengan pembagian

H. IMAM MOEDJIONO, RESOLUSI KONFLIK UMAT BERAGAMA MELALUI PENDIDIKAN AGAMA

berdasar urgensi dan ketepatan materi..

Belakangan TVRI secara rutin menayangkan dialog emansipatoris yang dikemas secara cantik, dengan melibatkan berbagai kalangan terkait. Kalau saja TV-TV swasta mengikuti jejaknya dengan kemasan yang lebih mempesona, maka besar harapan kita untuk mengeliminasi friksi dan konflik keagamaan secara permanen di Republik yang kita cintai, Indonesia.

Berbagai Forum Kerukunan antar Umat Beragama di beberapa daerah juga telah berupaya keras untuk mengeliminasi konflik dengan banyak menggelar dialog emansipatoris. Kalau saja di semua daerah sering digelar dialog serupa, besar harapan kita untuk hidup dalam kedamaian abadi. Semoga.***

Kepustakaan

Daya, Burhanuddin, *Agama Dialogis: Merenda dialektika idealita dan realita hubungan antar agama*, Mataram-Minang Lintas Budaya: Yogyakarta

Karen Armstrong 1996. Muhammad, *A Biography of The Prophet*. Victor Gollancz: London

Kimbal, Charles, 2003, *When Religion Become Evil*, Terjemahan Indonesia Nurhadi, "Kala Agama Jadi Bencana", Mizan; Bandung

Maarif, Syamsul, 2005. Pendidikan Pluralisme di Indonesia, Logung Pustaka: Yogyakarta

Marcel A. Boisard. *Jihad: A Commitment to Universal Peace* (Indianapolis, IN: American Trust Publications, 1988)

Saerozi, 2004. Politik Pendidikan Agama dalam Era Pluralisme, Tiara Wacana : Yogyakarta

Watt, William Montgomery, 1996. *Muslim-Cristian Encounter : Perception and Misperception*, Terjemahan Indonesia Zainuddin, 'Titik Temu Islam Kristen Persepsi dan Salah Persepsi', Gaya Media Pratama : Jakarta

Wijardjo, 2002. Konflik : *Bahaya atau Peluang*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta

Zaman, Ali-Noer (Ed.), 2000. *Agama Untuk Manusia*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta

Ajith Fernando, *Republika*, 24 Juni 2000

Azra, *Republika* 25 November 2004